



PENGARUH IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 9 TAHUN 2016 TENTANG PENYELENGGARAAN PERPUSTAKAAN OLEH DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN TERHADAP PENINGKATAN PELAYANAN PERPUSTAKAAN DI KABUPATEN BANDUNG

Widdy Yuspita Widiyaningrum

Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Bale Bandung (UNIBBA)
widdyuspita80@gmail.com

*Received: 18 Maret 2020; Revised: 19 Maret 2020; Accepted: 20 Maret 2020; Published: April 2020; Available
online: April 2020.*

ABSTRAK

Perpustakaan menjadi media, pusat informasi, dan sumber ilmu pengetahuan yang tidak akan pernah habis untuk diperdalam dan dikembangkan. Untuk itu, peneliti mengambil penelitian dengan permasalahan Implementasi kebijakan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perpustakaan oleh Dinas Arsip dan Perpustakaan terhadap Peningkatan Pelayanan Perpustakaan di Kabupaten Bandung, melalui (1) Bagaimanakah Implementasi kebijakan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perpustakaan oleh Dinas Arsip dan Perpustakaan di Kabupaten Bandung; (2) Bagaimanakah Peningkatan Pelayanan Perpustakaan oleh Dinas Arsip dan Perpustakaan di Kabupaten Bandung; (3) Pengujian Hipotesis: Pengaruh Implementasi kebijakan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perpustakaan oleh Dinas Arsip dan Perpustakaan terhadap Peningkatan Pelayanan Perpustakaan di Kabupaten Bandung. Ternyata hasil pengajuan hipotesis ini menunjukkan angka 4,032 yang mempunyai nilai lebih besar dibandingkan dengan nilai t tabel pada taraf signifikan 0,05 (dk = 100) yaitu sebesar 1,671 ($t_{hitung} > t_{tabel}$ atau $4,032 > 1,671$) yang berarti valid atau penerimaan terhadap Hipotesis Penelitian (H1) yang menyatakan “terdapat Pengaruh Implementasi kebijakan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perpustakaan oleh Dinas Arsip dan Perpustakaan terhadap Peningkatan Pelayanan Perpustakaan di Kabupaten Bandung” dan berarti pula penolakan terhadap Hipotesis Nol (H0) yang menyatakan “tidak terdapat Pengaruh Implementasi kebijakan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perpustakaan oleh Dinas Arsip dan Perpustakaan terhadap Peningkatan Pelayanan Perpustakaan di Kabupaten Bandung”.

Kata kunci: Implementasi Kebijakan, Penyelenggaraan Perpustakaan, Pelayanan Perpustakaan.

ABSTRACT

Libraries become media, information centers, and sources of knowledge that will never run out to be deepened and developed. For this reason, researchers took research with the problem of Implementing Regional Regulation Number 9 of 2016 concerning the Implementation of Libraries by the Archive and Library Service towards Improvement of Library Services in Bandung Regency, through (1) How is the Implementation of Regional Regulation Number 9 of 2016 concerning the Implementation of Libraries by the Department Archives and Libraries in Bandung Regency; (2) How is the Improvement of Library Services by the Archive and Library Service in Bandung Regency; (3) Hypothesis Testing: The Influence of the Implementation of Regional Regulation Number 9 of 2016 concerning the Implementation of Libraries by the Archive and Library Service to the Improvement of Library Services in Bandung Regency. It turns out that the results of submitting this hypothesis show the number 4.032 which has a value greater than the value of t table at a significant level of 0.05 ($dk = 100$) that is equal to 1.671 ($t_{\text{arithmetic}} > t_{\text{table}}$ or $4.032 > 1.671$) which means valid or acceptance of the Hypothesis Research (H1) which states "there is an Influence on the Implementation of Regional Regulation Number 9 Year 2016 concerning the Implementation of Libraries by the Archive and Library Service on Improving Library Services in Bandung Regency" and also means rejection of the Hypothesis Zero (H0) which states "there is no Influence on Implementation policy of Regional Regulation No. 9 of 2016 concerning the Implementation of Libraries by the Archive and Library Service for Improving Library Services in Bandung Regency".

Key word: Policy Implementation, Library Administration, and Library Services.



PENDAHULUAN

Keberadaan perpustakaan tidak dapat dipisahkan dari peradaban dan budaya umat manusia. Tinggi rendahnya peradaban dan budaya suatu bangsa dapat dilihat dari kondisi perpustakaan yang dimiliki. Penemuan mesin cetak, pengembangan teknik rekam, dan pengembangan teknologi digital yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi mempercepat tumbuh dan berkembangnya perpustakaan.

Sebagai sistem pengelolaan rekaman gagasan, pemikiran, pengalaman, dan pengetahuan umat manusia, perpustakaan mempunyai fungsi utama melestarikan hasil budaya, khususnya yang terbentuk dokumen karya cetak dan karya rekam lainnya serta menyampaikan gagasan, pemikiran pengalaman, dan pengetahuan kepada generasi sekarang dan generasi penerus.

Selain itu, perpustakaan berfungsi untuk mendukung Sistem Pendidikan Nasional, mengingat perpustakaan merupakan sumber informasi, ilmu pengetahuan dan teknologi,

kesenian, dan kebudayaan serta merupakan salah satu sarana pembangunan masyarakat informasi berbasis teknologi informasi dan komunikasi, sebagaimana yang dituangkan dalam Deklarasi *World Summit of Information Society-WSIS*, 12 Desember 2003.

Keberadaan sebuah perpustakaan di dalam suatu komunitas masyarakat disebabkan karena, Pertama: adanya keinginan yang datang dari kalangan masyarakat luas untuk terselenggaranya perpustakaan karena mereka membutuhkan. Kedua: adanya keinginan dari suatu organisasi, lembaga, atau pemimpin selaku penanggung jawab institusi tersebut membangun perpustakaan. Ketiga: adanya kebutuhan yang dirasakan oleh kelompok masyarakat tertentu tentang pentingnya sebuah perpustakaan. Keempat: diperlukan wadah atau tempat yang bisa untuk menampung, mengolah, memelihara, dan memberdayakan hasil karya umat manusia dalam bentuk ilmu pengetahuan, sejarah, penemuan, budaya, dan lain sebagainya.

Perpustakaan menjadi media, pusat informasi, dan sumber ilmu pengetahuan yang tidak akan pernah habis untuk diperdalam dan dikembangkan. Melalui perpustakaan masyarakat dapat untuk saling bertukar pikiran, menambah wawasan, dan pengalaman serta merupakan nilai tambah dalam mengembangkan pola kehidupan.

Mengingat pentingnya keberadaan dari perpustakaan di tengah masyarakat, maka didirikanlah salah satu jenis perpustakaan yakni perpustakaan umum. Perpustakaan umum merupakan salah satu perangkat Pemerintah Daerah berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah (Bupati/Walikota) dalam Sutarno (2006:71). Perpustakaan umum berfungsi melayani semua lapisan masyarakat dalam memperoleh dan meningkatkan ilmu pengetahuan sehingga dapat dikatakan bahwa perpustakaan umum mempunyai peran yang strategis dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Perpustakaan amat penting bagi kehidupan kultural dan kecerdasan bangsa karena perpustakaan umum

merupakan gerbang menuju pengetahuan, mendukung perorangan, dan kelompok untuk melakukan kegiatan belajar seumur hidup, pengambilan keputusan mandiri, dan pembangunan budaya.

Pemerintah Daerah seyogyanya mengapresiasi perpustakaan dan taman bacaan yang didirikan dan dikelola masyarakat secara mandiri yang membantu Pemerintah Daerah dalam memberikan layanan perpustakaan sehingga dapat menumbuhkembangkan budaya kegemaran membaca dan belajar sepanjang hayat.

Berdasarkan pokok pemikiran tersebut, pengelolaan perpustakaan yang diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perpustakaan, bertujuan untuk:

1. Menyediakan pelayanan perpustakaan kepada masyarakat secara cepat dan tepat.
2. Mewujudkan keberlangsungan pengelolaan dan pengembangan perpustakaan di daerah sebagai wahana pendidikan, penelitian, sumber informasi, ilmu



pengatahuan, teknologi, kesenian, wahana pelestarian budaya daerah dan rekreasi sesuai karakteristik budaya daerah.

3. Melaksanakan pembudayaan kegemaran membaca dan memperluas wawasan serta pengetahuan guna mencerdaskan kehidupan masyarakat.

Untuk itu, Dinas Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Bandung dalam melaksanakan kebijakannya diatur melalui Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perpustakaan merupakan lembaga teknis yang memiliki 4 (empat) komponen di bidangnya yaitu pengembangan, pembinaan, pelayanan, dan pelestarian. Salah satu komponennya adalah pelayanan yang merupakan ujung tombak dari perpustakaan. Dinas Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Bandung sebagai lembaga sebagai lembaga publik memberikan pelayanan informasi kepada masyarakat tidak menitikberatkan pada pencarian keuntungan materi.

Implementasi kebijakan yang digunakan oleh Dinas Arsip dan Perpustakaan Kabupaten

Bandung yaitu melalui pandangan Edward III (Subarsono, 2008:90) yang dipengaruhi oleh 4 (empat) variabel, yaitu:

1. Komunikasi. Keberhasilan implementasi kebijakan mensyaratkan agar implementor mengetahui apa yang harus dilakukan. Apa yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus ditransmisikan kepada kelompok sasaran (target group) sehingga akan mengurangi distorsi implementasi. Apabila tujuan dan sasaran tidak jelas atau bahkan tidak diketahui sama sekali oleh kelompok sasaran, maka kemungkinan akan terjadi resistensi dari kelompok sasaran.
2. Sumber daya. Walaupun isi kebijakan sudah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten tetapi apabila implementor kekurangan sumber daya untuk melaksanakan, maka implementasi tidak akan berjalan efektif. Sumber daya tersebut dapat berwujud sumber daya manusia yakni

kompetensi implementer dan sumber daya finansial.

3. Disposisi. Disposisi adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementor, seperti komitmen, kejujuran, dan sifat demokratis. Apabila implementor memiliki disposisi yang baik, maka akan dapat menjalankan kebijakan dengan baik pula seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan. Ketika implementor memiliki sikap atau perspektif yang berbeda dengan pembuat kebijakan, maka proses implementasi kebijakan juga akan menjadi efektif.
4. Struktur birokrasi. Struktur organisasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Salah satu aspek struktur yang penting dari setiap organisasi adalah adanya prosedur operasi yang standar (standard operating procedures). SOP menjadi pedoman bagi setiap implementor dalam bertindak. Struktur organisasi yang terlalu panjang, akan cenderung melemahkan pengawasan dan

menimbulkan red-tape, yakni prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks. Ini pada gilirannya menyebabkan aktivitas organisasi tidak fleksibel.

Keempat variabel tersebut mengarah pada inti sejauhmana tindakan para pelaksana sesuai dengan prosedur dan tujuan kebijakan yang telah digariskan para pembuat kebijakan di level pusat. Fokus tersebut membawa konsekuensi pada perhatian terhadap aspek organisasi atau birokrasi sebagai ukuran efisiensi dan efektivitas pelaksanaan kebijakan.

Salah satu komponen penting pada sebuah perpustakaan adalah pelayanan perpustakaan. Komponen ini sangat diperlukan untuk memberikan pelayanan (jasa) kepada masyarakat sampai mampu memberikan tingkat kepuasan terhadap masyarakat yang dilayani. Dalam Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perpustakaan, di mana, perpustakaan sendiri Pasal 1 Ayat (5) adalah institusi pengelola koleksi karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam secara



profesional dengan sistem yang baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan, pelestarian, informasi, dan rekreasi para pemustaka. Sementara itu, pada Pasal 1 Ayat (18) pemustaka adalah pengguna perpustakaan yaitu perseorangan, kelompok orang, masyarakat atau lembaga yang memanfaatkan fasilitas layanan perpustakaan baik secara langsung termasuk yang menggunakan informasi dan sumber informasi melalui sistem akses/online.

Menurut Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perpustakaan, pelayanan perpustakaan pada Pasal 34, terdiri atas: sistem terbuka dan sistem tertutup. Sistem terbuka adalah suatu sistem layanan perpustakaan yang memperbolehkan pemustaka untuk mencari dan memilih sendiri koleksi yang dibutuhkan tanpa bantuan pustakawan dan/atau tenaga pengelola perpustakaan. Sementaraitu, sistem tertutup adalah suatu sistem layanan perpustakaan yang tidak memperbolehkan pemustaka untuk mencari dan memilih sendiri koleksi yang dibutuhkan tetapi dengan bantuan pustakawan

dan/atau tenaga pengelola perpustakaan.

Adapun jenis pelayanan perpustakaan menurut Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perpustakaan, jenis pelayanan perpustakaan dalam Pasal 37 yaitu, pelayanan teknis dan layanan pemustaka. Pelayanan teknis adalah pekerjaan perpustakaan dalam mempersiapkan bahan perpustakaan sebelum digunakan untuk menyelenggarakan layanan baca. Sementara itu, layanan pemustaka adalah aktifitas perpustakaan dalam memberikan jasa layanan kepada pemustaka khususnya kepada anggota perpustakaan.

Dari sisi kepentingan perpustakaan, maka tujuan diselenggarakan layanan perpustakaan pada umumnya adalah agar bahan pustaka yang disediakan perpustakaan dapat dimanfaatkan secara maksimal oleh pemakai. Sangat tidak berarti apabila bahan pustaka yang dikumpulkan, diolah, dan ditata dengan rapi di perpustakaan ternyata tidak dapat dimanfaatkan secara maksimal oleh pemakai. Pemanfaatan bahan pustaka secara

maksimal dapat tercapai apabila perpustakaan dikelola secara baik dan benar, menyelenggarakan layanan bahan pustaka, kegiatan penyebaran informasi, ditunjang dengan kegiatan promosi perpustakaan serta penciptaan lingkungan yang dapat menumbuhkan peningkatan minat baca.

Menurut Zeithaml dalam Sedarmayanti (2000:205) yang menyatakan bahwa tolak ukur kualitas pelayanan dalam hal ini melalui pelayanan perpustakaan dapat diukur oleh sepuluh dimensi, yaitu:

1. Tangibles (berwujud), ruangan dan peralatan harus nyaman dan tertata dengan baik serta petugas pelayanan senantiasa berpakaian rapi.
2. Reliability (kehandalan), kinerja pustakawan harus dapat diandalkan dan akurat sehingga mampu menekan sekecil mungkin tingkat kesalahan yang terjadi.
3. Responsiveness (daya tanggap atau koresponsifan), setiap pustakawan harus mampu memberi jawaban kepada setiap permintaan pengguna dalam waktu yang relatif

singkat. Apabila jawabannya tidak ditemukan, pustakawan harus mampu mengacu pertanyaan ke sumber informasi yang tepat. Dalam hal ini, bahan rujukan menjadi sangat penting.

4. Competence (pengetahuan dan keterampilan), pustakawan yang bertugas melayani masyarakat harus terlatih dengan memadai sehingga dari segi teknis maupun etika berkomunikasi sangat menguasai dan mampu melaksanakan tugas tersebut dengan baik.
5. Acces (kemudahan hubungan), setiap pengguna perpustakaan harus memiliki akses yang mudah terhadap jasa perpustakaan. Suasana perpustakaan harus menyenangkan dan dilengkapi sarana komunikasi dan kalau memungkinkan juga fasilitas akses secara elektronik sehingga pelacakan informasi dapat dilaksanakan dengan cepat dan akurat.
6. Courtesy (perilaku), setiap pustakawan harus bersikap sopan, bersahabat, tanggap terhadap kebutuhan pengguna,



hormat dan ramah kepada setiap pengguna.

7. Communication (komunikasi), setiap pustakawan harus mampu memberi layanan untuk mendengarkan suara, keinginan atau aspirasi pengguna sekaligus kesediaan untuk selalu menyampaikan informasi baru kepada masyarakat pengguna.
8. Credibility (kredibilitas atau kejujuran), setiap pustakawan harus mampu memiliki kredibilitas yang tinggi dan yang paling cocok dengan kebutuhan pengguna.
9. Security (keamanan), pelayanan perpustakaan harus dapat menjamin keselamatan fisik, keuangan, serta bahan-bahan yang dianggap rahasia.
10. Understanding the Customer (memahami atau mengerti kebutuhan masyarakat pengguna), setiap pustakawan harus mampu menggali, mengidentifikasi, dan memahami kebutuhan pengguna.

Sejalan dengan pendapat di atas, perpustakaan merupakan kegiatan memberikan layanan informasi kepada pengguna perpustakaan dengan

menggunakan prinsip-prinsip dasar:

1. Pelayanan bersifat universal, layanan tidak hanya diberikan kepada individu-individu tertentu, tetapi diberikan kepada pengguna secara umum.
2. Pelayanan berorientasi pada pengguna, dalam arti untuk kepentingan para pengguna, bukan kepentingan pengelola.
3. Menggunakan disiplin, untuk menjamin keamanan dan kenyamanan dalam memanfaatkan perpustakaan.
4. Sistem yang dikembangkan mudah, cepat, dan tepat.

Kegiatan perpustakaan yang langsung dirasakan oleh pengguna adalah pelayanan, karena pelayanan dianggap sebagai ujung tombak perpustakaan. Layanan perpustakaan merupakan tolak ukur keberhasilan sebuah perpustakaan. Hal itu karena kegiatan layanan merupakan kegiatan yang mempertemukan langsung antara petugas dengan pengguna perpustakaan sehingga penilaian pengguna akan muncul ketika kegiatan layanan tersebut dilaksanakan.

METODE PENELITIAN

Objek Penelitian

Pada penelitian ini objek yang diambil adalah jumlah pegawai di Dinas Arsip dan Perpustakaan sebanyak 313 Orang dan jumlah Pemustaka sampai dengan bulan Desember 2019 sebanyak 27263 Orang, jadi total jumlah populasi sebanyak 27576 Orang dan tingkat presisi yang ditetapkan sebesar 10%. Jadi, jumlah sampel adalah 100 reponden.

Metode Analisis

Dengan menggunakan Skala Likert, maka variabel yang akan diukur dijabarkan menjadi dimensi, dimensi dijabarkan menjadi sub variabel, kemudian sub variabel dijabarkan lagi menjadi indikator-indikator yang dapat diukur. Akhirnya indikator-indikator yang terukur ini dapat dijadikan titik tolak untuk membuat item instrumen yang berupa pertanyaan atau pernyataan yang perlu dijawab oleh responden. Setiap jawaban dihubungkan dengan bentuk pernyataan atau dukungan sikap yang diungkapkan dengan kata-kata sebagai berikut:

Tabel 1
Pernyataan Skala Sikap

No.	Alternatif Jawaban	Nilai/bobot
1	Sangat Setuju (SS)	5
2	Setuju (S)	4
3	Netral (N)	3
4	Tidak Setuju (TS)	2
5	Sangat Tidak Setuju (STS)	1

Untuk mengukur implementasi kebijakan terhadap peningkatan pelayanan perpustakaan di Kabupaten Bandung, peneliti menggunakan kriteria pengukuran dari Riduwan (2008:88). Dengan kriteria interpretasi skor sebagai berikut:

- 1) Angka 0% - 20% = Sangat Lemah
- 2) Angka 21% - 40% = Lemah
- 3) Angka 41% - 60% = Cukup
- 4) Angka 61% - 80% = Kuat
- 5) Angka 81% - 100% = Sangat Kuat

Hasil perhitungan melalui data responden, maka didapat frekuensi x skor kemudian dibagi dengan nilai tertinggi x 100% dan akan menghasilkan prosentase, untuk lebih jelas rumus yang digunakan adalah sebagai berikut:



$$\frac{\text{skor yang dicapai}}{\text{skor tertinggi}} \times 100 \%$$

$$\frac{\sum f \cdot b}{\text{skor tertinggi}} \times 100 \%$$

Di mana:

f = frekuensi (banyaknya responden)

b = bobot penilaian (bobot/skor 1, 2, 3, 4, 5)

$\sum$ = jumlah keseluruhan (f . b)

Sementara untuk menghitung adalah sebagai berikut:

Skor tertinggi = $\sum$ responden x bobot tertinggi

Selanjutnya, untuk menguji keeratan kedua variabel yang diteliti, digunakan rumus Korelasi Spearman Rank (Riduwan, 2008:132), yaitu kegunaannya untuk mengukur tingkat atau eratnya hubungan antara variabel bebas dan variabel terikat yang berskala ordinal.

Statistik ujinya adalah sebagai berikut: $r_s = 1 - \frac{6 \sum di^2}{n(n^2-1)}$

Di mana:

r_s = Nilai Korelasi Spearman Rank

d^2 = Selisih setiap pasangan Rank

n = Jumlah pasangan Rank untuk Spearman

Oleh karena itu, jumlah sampel penelitian ini lebih dari 10 ($n > 10$) yaitu 100 Orang, kemungkinan akan terdapat

peringkat sama atau Rank kembar dan digunakan perhitungan statistik Spearman Rank Correlation dengan Faktor Koreksi (Siegel, 1997:256), maka rumus yang digunakan adalah sebagai berikut: $r_s = \frac{\sum x^2 + \sum y^2 - \sum di^2}{2 \sqrt{\sum x^2 \sum y^2}}$

Untuk Faktor Korelasinya, digunakan rumus: $T = \frac{t^3 - t}{12}$

Selanjutnya, untuk menghitung

$$\sum x^2 = \frac{n^3 - n}{12} - \sum T$$

Kemudian, untuk menghitung $\sum y^2$, rumus yang digunakan adalah

$$\text{sebagai berikut: } \sum y^2 = \frac{n^3 - n}{12} - \sum T$$

Selanjutnya, karena $n > 30$, maka signifikan r_s diuji dengan t distribusi (Sugiyono, 2002:234)

$$\text{dengan rumus: } t = r_s \sqrt{\frac{n-2}{1-r_s^2}}$$

Kaidah keputusan: Jika $t_{\text{hitung}} > t_{\text{tabel}}$ berarti Valid, sebaliknya

Jika $t_{\text{hitung}} < t_{\text{tabel}}$ berarti Tidak Valid

Untuk mengetahui atau menganalisa hubungan yang saling menentukan antara kedua variabel yang diteliti, dilakukan dengan menggunakan Koefisien Determinan (r^2).

PEMBAHASAN

Implementasi kebijakan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perpustakaan oleh Dinas Arsip dan Perpustakaan di Kabupaten Bandung

Tabel 3

Kriteria Pengukuran Variabel bebas (Variabel X) mengenai Implementasi kebijakan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perpustakaan oleh Dinas Arsip dan Perpustakaan di Kabupaten Bandung

Variabel	Dimensi	Indikator-indikator	%	Kriteria
Implementasi Kebijakan (Variabel X)	Komunikasi	a. Penyaluran komunikasi yang baik oleh Dinas Arsip dan Perpustakaan	30,2	Lemah
		b. Kejelasan akan komunikasi untuk disampaikan kepada pemustaka selaku penerima pelayanan perpustakaan.	29,6	Lemah
		c. Perintah dari Dinas Arsip dan Perpustakaan akan memudahkan kebijakan.	34,2	Lemah
	Sumber Daya	a. Pegawai diharapkan mempunyai kecakapan dalam mengimplementasikan kebijakan.	32,8	Lemah
			39,00	Lemah

		b. Melalui informasi yang tepat diharapkan akan berdampak baik pada pelaksanaan kebijakan.	29,2	Lemah
		c. Tidak terjadi penyalahgunaan kewenangan dalam kebijakan.	38,00	Lemah
		d. Sarana dan prasarana sangat dibutuhkan dalam implementasi kebijakan.		
	Disposisi	a. Para pelaksana akan mengalami hambatan apabila tidak dilaksanakan kebijakan yang diinginkan.	37,80	
		b. Tidak terjadi manipulasi insentif oleh para pelaksana kebijakan.	37,00	
	Struktur Birokrasi	Para pelaksana kebijakan harus mempunyai keinginan untuk melaksanakan kebijakan.	35,20	

Sumber: Hasil Penelitian, Tahun 2019

Tabel 4

Kriteria Pengukuran Variabel bebas (Variabel Y) mengenai Peningkatan Pelayanan Perpustakaan oleh Dinas Arsip dan Perpustakaan di Kabupaten Bandung

Variabel	Dimensi	Indikator-indikator	%	Kriteria
----------	---------	---------------------	---	----------



Kualitas Pelayanan Perpustakaan (Variabel Y)	<i>Tangible</i>	Kenyamanan dalam ruangan perpustakaan	36,4	Lemah
	<i>Reliability</i>	Pegawai perpustakaan yang dapat diandalkan	35	Lemah
	<i>Responsiveness</i>	Memberikan informasi yang akurat dan tepat	35,2	Lemah
	<i>Competence</i>	Menguasai dan melaksanakan tugas dengan baik	35,2	Lemah
	<i>Courtesy</i>	Sikap ramah dan sopan para pegawai perpustakaan	34	Lemah
	<i>Credibility</i>	Kredibilitas yang tinggi dalam pekerjaan	36,4	Lemah
	<i>Security</i>	Keamanan terkait berkas yang dianggap penting (rahasia)	34,8	Lemah
	<i>Access</i>	Kemudahan dalam mendapatkan informasi	35,4	Lemah
	<i>Communications</i>	Memberikan pelayanan sesuai dengan aspirasi dan keinginan pengguna perpustakaan	38	Lemah
	<i>Understanding the Customers</i>	Memahami dan mengerti kebutuhan masyarakat pengguna perpustakaan	35	Lemah

Sumber: Hasil Penelitian Tahun 2019

Pengujian Hipotesis
Pengaruh Implementasi kebijakan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perpustakaan oleh Dinas Arsip dan Perpustakaan terhadap Peningkatan Pelayanan

Perpustakaan di Kabupaten Bandung

Untuk menguji kadar Implementasi Kebijakan Implementasi kebijakan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perpustakaan oleh Dinas Arsip dan Perpustakaan (Variabel X) terhadap Peningkatan Pelayanan Perpustakaan di Kabupaten Bandung (Variabel Y) digunakan perhitungan statistik Spearman Rank Correlation dengan Faktor Koreksi.

Selanjutnya, untuk menguji keeratan kedua variabel yang diteliti, digunakan rumus Korelasi Spearman Rank (Riduwan, 2008:132), yaitu kegunaannya untuk mengukur tingkat atau eratnya hubungan antara variabel bebas dan variabel terikat yang berskala ordinal. $r_s = 1 - \frac{6 \sum di^2}{n(n^2-1)}$

Hasil perhitungan Spearman Rank Correlation untuk mencari Variabel X dan Variabel Y dapat dilihat sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{Diketahui: } di^2 &= 97479 \\ \sum x^2 &= 80062,35 \\ \sum y^2 &= 76432,7 \end{aligned}$$

Nilai-nilai di atas, dimasukkan ke dalam rumus

Spearman Rank Correlation sebagai

berikut:
$$r_s = \frac{\sum x^2 + \sum y^2 - \sum di^2}{2\sqrt{\sum x^2 \sum y^2}}, \quad r_s = \frac{80062,35 + 76432,7 - 97479}{2\sqrt{80062,35 \times 76432,7}} = 0,3772$$

Kemudian nilai yang di dapat sebesar 0,3772 itu disesuaikan dengan kategori nilai korelasi. Ternyata hasil perhitungan pearman Rank Correlation sebesar 0,3772 menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang rendah (0,20 - 0,399) antara Implementasi kebijakan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perpustakaan oleh Dinas Arsip dan Perpustakaan terhadap Peningkatan Pelayanan Perpustakaan di Kabupaten Bandung. Keadaan ini seperti dipertegas dengan perhitungan signifikan (uji t) untuk menunjukkan hipotesis mana yang akan diterima atau ditolak.

Perhitungan untuk memperoleh nilai t_{hitung} adalah sebagai berikut: $t =$

$$r_s \sqrt{\frac{n-2}{1-r_s}}, t = 0,3772 \sqrt{\frac{100-2}{1-0,3772}} = 4,032$$

Distribusi tabel t untuk $\alpha = 0,05$ dan derajat kebebasan ($dk = n - 2$)

Kaidah keputusan: Jika $t_{hitung} > t_{tabel}$ berarti Valid, sebaliknya Jika $t_{hitung} < t_{tabel}$ berarti Tidak Valid

Ternyata hasil pengajuan hipotesisi ini menunjukkan angka 4,032 yang mempunyai nilai lebih besar dibandingkan dengan nilai t_{tabel} pada taraf signifikan 0,05 ($dk = 100$) yaitu sebesar 1,671 ($t_{hitung} > t_{tabel}$ atau $4,032 > 1,671$) yang berarti valid atau penerimaan terhadap Hipotesis Penelitian (H1) yang menyatakan “terdapat Implementasi kebijakan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perpustakaan oleh Dinas Arsip dan Perpustakaan terhadap Peningkatan Pelayanan Perpustakaan di Kabupaten Bandung” dan berarti pula penolakan terhadap Hipotesis Nol (H0) yang menyatakan “tidak terdapat Implementasi kebijakan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perpustakaan oleh Dinas Arsip dan Perpustakaan terhadap Peningkatan Pelayanan Perpustakaan di Kabupaten Bandung”.

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa terdapat Implementasi kebijakan Peraturan



Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perpustakaan oleh Dinas Arsip dan Perpustakaan terhadap Peningkatan Pelayanan Perpustakaan di Kabupaten Bandung yang teruji di lapangan. Untuk mengetahui seberapa besar keadaan variabel bebas menentukan variabel terikat, digunakan perhitungan Koefisien Determinan (r^2), yaitu sebagai berikut:

$$(r^2) = 0,3772^2 = 0,1423 \Rightarrow \times 100 \% \\ = 14,23 \%$$

Persentase yang diperoleh di atas mengandung pengertian bahwa Variabel Y ditentukan oleh Variabel X sebesar 14,23 %. Dengan demikian kualitas pelayanan perpustakaan untuk di Kabupaten Bandung ditentukan oleh faktor implementasi kebijakan oleh Dinas Arsip dan Perpustakaan sebesar 14,23 % sedangkan sisanya 85,77 % ditentukan oleh faktor lain sehingga seberapa besar Implementasi kebijakan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perpustakaan oleh Dinas Arsip dan Perpustakaan terhadap Peningkatan Pelayanan Perpustakaan di Kabupaten Bandung yaitu 14,23 %.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian pada implementasi kebijakan (variabel X) terhadap kualitas pelayanan perpustakaan (variabel Y), tergolong kuat/valid sehingga semua dimensi dan indikator dalam variabel pakai atau digunakan untuk mengukur sampai sejauh mana implementasi kebijakan terhadap kualitas pelayanan perpustakaan berhasil ataukah tidak berhasil dalam tujuannya mensejahterakan masyarakat dengan kriteria valid atau digunakan.

Hasil penelitian ini mengkonfirmasi bahwa implementasi kebijakan oleh Dinas Arsip dan Perpustakaan dan penerapannya terhadap peningkatan kualitas pelayanan perpustakaan berkriteria kuat/valid, dan akan lebih mewujudkan kinerja para pelaksana kebijakan yang optimal sehingga diharapkan akan mempengaruhi kualitas pelayanan perpustakaan yang diberikan pada masyarakat dan menghasilkan kebijakan yang tepat sasaran.

Untuk mewujudkan kualitas pelayanan yang prima, diperlukan penggunaan instrumen secara

konsisten pengukuran kinerja pelayanan secara jujur dan pengukuran indeks kepuasan masyarakat, di samping diperlukannya suatu dokumen yang dinamakan citizen's charter yang digunakan oleh providers maupun customers sebagai acuan guna mejamin implementasi kebijakan yang prima.

SARAN

Perbaikan kualitas pelayanan harus senantiasa didasarkan pada 3 (tiga) hal, yaitu Pertama, hasil pengukuran indeks kepuasan pemustaka melalui proses penelitian yang cermat, akurat, dan akuntabel serta berkelanjutan. Kedua, berdasarkan pada perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sehingga kualitas pelayanan perpustakaan bersifat dinamis dan berkembang dari waktu ke waktu. Esensi visi pelayanan adalah terwujudnya kualitas pelayanan perpustakaan melalui implementasi kebijakan prima yang berarti mampu mewujudkan kepuasan pemustaka dalam upaya mendapatkan kualitas pelayanan dari instansi pemerintah dalam hal ini adalah dari Dinas Arsip dan

Perpustakaan. Berdasarkan visi tersebut, maka misi pelayanan pada dasarnya adalah mengimplementasikan asa, prinsip, nilai-nilai pelayanan baik berdasarkan landasan normatif maupun landasan keputusan yang sesuai dengan hakikat pelayanan.

Untuk meningkatkan kualitas pelayanan diperlukan strategi pembaharuan yang mencakup 3 (tiga) aspek yaitu aspek pembaharuan kelembagaan birokrasi pemerintahan, aspek pembaharuan identitas aparatur pemerintah, dan aspek pembaharuan proses pelaksanaan kewajiban pemerintah.

Pembaharuan kelembagaan melalui strategi reorientasi birokrasi yaitu redefinisi visi, misi, dan kenijakan yang berpihak kepada kepentingan publik. Dilanjutkan restrukturisasi untuk mewujudkan kelembagaan birokrasi pemerintah yang ramping, efektif, dan efisien.

Pembaharuan identitas aparatur birokrasi pemerintah yaitu aparatur pemerintah yang memiliki sikap dan karakter yang peka (*responsiveness*), bertanggung jawab (*accountable*), tidak meyalanggunakan wewenang serta



sesuai dengan kepentingan publik, ekonomis, efektif dan efisien, serta tidak membedakan pelanggan (*equality*), adil (*equity*), dan jujur/terbuka (*fairness*). Dan aparatur senantiasa mengembangkan semangat pelayanan sehingga pemerintah dapat memiliki pengaruh dalam arti kemampuan mengembangkan partisipasi dan kepercayaan masyarakat.

Sedangkan, pembaharuan proses pelaksana kewajiban pemerintah melalui strategi penyederhanaan birokrasi, mengutamakan kepentingan masyarakat sebagai pelanggan, memanfaatkan dan memberdayakan bawahan agar meningkat produktivitas kerja dan kembali ke fungsi dasar pemerintah sebagai pengayom, pelindung, dan pelayan masyarakat.

Dengan demikian, diharapkan dapat mewujudkan

penyelenggaraan pelayanan yang memenuhi prinsip transparansi dan akuntabel sehingga dapat melestarikan kepercayaan masyarakat kepada pemerintahan serta mengembangkan partisipasi masyarakat. Namun demikian, transparansi dan akuntabel yang merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan secara utuh oleh setiap instansi dan unit pelayanan instansi pemerintah sesuai dengan tugas dan fungsinya belum juga dapat dilaksanakan secara menyeluruh.

Jelasnya, semakin teknis kebijakan yang dilaksanakan, maka semakin besar pula keahlian yang dibutuhkan para pelaksana kebijakan, maka semakin besar pula kekurangan para pelaksana kebijakan yang mempunyai keterampilan yang memadai dan hal ini akan menghambat pelaksana kebijakan

DAFTAR PUSTAKA

Agustino, Leo, 2006. Politik dan Kebijakan Publik, Bandung: Puslit KP2W Lemlit Unpad AIPI Bandung.

Riduwan, 2008. Metode dan Teknik Menyusun Tesis, Bandung: Alfabeta.

Saefullah, Asep Djadja, 2009. Pemikiran Kontemporer Administrasi Publik, Perspektif Manajemen Sumber daya

- Manusia dalam Era Desentralisasi, Bandung: LP3AN FISIP UNPAD.
- Santosa, Pandji, 2008. Administrasi Publik, Teori, dan Aplikasi Good Governance, Bandung: Refika Aditama
- Sedarmayanti, 2017. Reformasi Administrasi Publik, Reformasi Birokrasi, dan Kepemimpinan Masa Depan. Bandung: Refika Aditama
- Siegel, Sidney, 1997. Statistik Nonparametrik untuk Ilmu-ilmu Sosial. Jakarta. Gramedia
- Subarsono, 2008. Analisis Kebijakan Publik, Konsep, Teori dan Aplikasi. Yogyakarta. Pustaka Pelajar
- Sutarno, 2006. Manajemen Perpustakaan Suatu Pendekatan Praktik. Jakarta: Sagung Seto.
- Sugiyono, 2002. Statistika untuk Penelitian. Bandung. Alfabeta
- _____, 2008. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D, Bandung. Alfabeta
- Surjadi, 2009. Pengembangan Kinerja Pelayanan Publik, Bandung: Refika Aditama
- _____, Pengembangan Kinerja Pelayanan Publik, Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: 63/KEP/M.PAN/7/2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik, Bandung: Refika Aditama
- Wasistiono, Sadu, 2003. Kapita Selekta Manajemen Pemerintahan Daerah, Bandung: Fokus Media
- Winarno, Budi, 2008. Kebijakan Publik, Teori, dan Proses, Yogyakarta: Media Pressindo.
- Dokumen lain:*
- Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perpustakaan